

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	5
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Aliefmedia.id
Media Cetak	

Pedagang Kantin Keluhkan Penurunan Omzet Akibat Program MBG, Pemprov Jakarta Akan Lakukan Evaluasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu kelompok yang terdampak oleh kebijakan ini adalah pedagang kantin sekolah, yang melaporkan penurunan omzet sejak program tersebut mulai diterapkan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh, menanggapi keluhan ini dengan menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi untuk mencari solusi terbaik. "Terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena kemudian mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan dievaluasi," ujar Teguh saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Utara pada Senin (13/1/2025).

Fokus pada Penambahan SPPG

Dalam keterangannya, Teguh menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI tengah berfokus pada pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas jangkauan program MBG ke lebih banyak sekolah. "Saat ini, SPPG masih dalam tahap evaluasi dan pengembangan. Kami masih fokus membangun infrastruktur seperti yang telah direncanakan," tambahnya.

Program MBG dirancang untuk memastikan siswa di sekolah-sekolah DKI Jakarta mendapatkan akses ke makanan sehat dan bergizi secara gratis. Namun, implementasi program ini tampaknya memberikan dampak tidak terduga pada aktivitas ekonomi pedagang kantin yang selama ini mengandalkan penjualan kepada siswa.

Rencana Evaluasi Bersama Badan Gizi Nasional

Menanggapi keluhan yang muncul, Teguh menyatakan bahwa Pemprov DKI akan membawa isu ini ke dalam agenda evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). "Kami sudah mendengar masukan dari para pedagang dan pihak terkait lainnya. Nantinya, dalam forum evaluasi bersama BGN, kami akan memberikan saran dan masukan berdasarkan pengamatan di lapangan," jelas Teguh.

Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu menyeimbangkan pelaksanaan program MBG dengan keberlangsungan ekonomi para pedagang kantin. Pemprov DKI menyadari pentingnya mendukung pelaku usaha kecil yang turut berkontribusi pada ekonomi lokal.

Respon Pedagang Kantin

Sementara itu, beberapa pedagang kantin menyuarakan harapan agar pemerintah dapat mencari solusi yang adil. “Kami mendukung program makanan bergizi untuk anak-anak, tetapi kami juga berharap ada kebijakan yang mempertimbangkan keberlangsungan usaha kecil seperti kami,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Pedagang kantin mengusulkan beberapa alternatif, seperti pelibatan mereka dalam penyediaan makanan untuk program MBG atau pemberian kompensasi bagi kantin yang terdampak. Usulan ini dinilai bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan antara pemerintah, pedagang, dan siswa.

Upaya Pemprov DKI Mencari Solusi

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang maksimal tanpa mengorbankan pihak lain. Evaluasi yang dilakukan bersama BGN diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki dan menyempurnakan program ini.

Dengan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan siswa untuk mendapatkan makanan bergizi dan keberlangsungan ekonomi para pedagang kantin.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas gizi siswa di DKI Jakarta. Namun, dampak tidak langsung terhadap pedagang kantin perlu menjadi perhatian. Evaluasi dan dialog antara pemerintah, pedagang, dan lembaga terkait adalah kunci untuk menemukan solusi terbaik yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya untuk terus memperbaiki program ini agar dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usaha kecil.